

**FACTORS THAT INFLUENCE FRAUD TRENDS IN THE SECTOR
GOVERNMENT (EMPIRE STUDY AT SERVICES
IN JAMBI PROVINCE)**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
KECENDRONGAN KECURANGAN (FRAUD) DI SEKTOR
PEMERINTAHAN (STUDI EMPIRIS PADA DINAS-DINAS
DI PROVINSI JAMBI)**

Rio Antoni¹⁾

Enggar Diah P.A²⁾

Fitrini Mansur³⁾

¹⁾Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3)}Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: rioantoni75@yahoo.com¹⁾, enggar_diah@unja.ac.id²⁾, fitrinimansur@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine and examine the influence of human resource competence, internal control, and enforcement of regulations / laws against the tendency of fraud (fraud) in the management of regional finances. The core of this study aims to explore a number of factors that cause fraud in the Government of Jambi Province. This research is a quantitative research with primary and secondary data sources. Primary data in this study by distributing questionnaires to respondents. Determination of the sample using non-probability sampling with purposive sampling method in order to obtain a sample of 52 from 21 Jambi Provincial Offices. The data analysis method used in this research is multiple regression analysis method with the help of using the SPSS for windows version 22 program.

The results of this study indicate that there is a positive influence of HR competence on the incidence of fraud in the government sector, there is no influence of Internal Control on the tendency of fraud in the government sector, and there is a significant negative effect of Regulation Enforcement on the tendency of fraud.) in the government sector.

Suggestions in this study to government service agency officials in Jambi Province are expected to improve government performance as a responsibility as public servants of budget organizations in order to prosper the people of Jambi Province through accountability, transparency and clarity of budget targets, good internal control and organized reporting structured and can give rewards to employees who have good performance, work discipline, and

avoid factors that can affect fraud (cheating). For further researchers, it is hoped that it can expand the research variables and use the interview method and expand the population.

Keywords: Fraud , Human resource competence, Internal Control, Regulatory Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji Pengaruh Kompetensi SDM, Pengendalian Internal, Dan Penegakan Peraturan/Hukum Terhadap Terjadinya Kecendrungan Kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah. Inti dari penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud pada Pemerintah di Provinsi Jambi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Penentuan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling sehingga didapat sampel sebanyak 52 dari 21 Dinas-Dinas Provinsi Jambi. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan menggunakan program SPSS for windows versi 22.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif Kompetensi SDM terhadap terjadinya kecendrungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh Pengendalian Internal terhadap terjadinya kecendrungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, dan terdapat pengaruh negatif signifikan Penegakan Peraturan terhadap terjadinya kecendrungan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.

Saran dalam penelitian ini kepada aparaturnya instansi dinas-dinas pemerintah di Provinsi Jambi yaitu diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pemerintah sebagai tanggung jawab selaku pelayan publik yang mengelola anggaran agar dapat mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi melalui akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian intern yang baik dan pelaporan yang tertata dan terstruktur serta dapat memberikan reward kepada pegawai yang mempunyai kinerja baik, disiplin kerja, dan menghindari faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecendrungan kecurangan (fraud). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dan menggunakan metode wawancara serta memperluas populasi.

Kata kunci: Kecurangan (Fraud), Kompetensi SDM, Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan

1. PENDAHULUAN

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi atau yang dalam bahasa pengauditan disebut dengan fraud akhir – akhir ini menjadi berita utama dalam pemberitaan media yang sering terjadi. Pada dasarnya ada dua tipe kecurangan yang terjadi di suatu instansi ataupun perusahaan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan dan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan.

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global menunjukkan bahwa setiap tahun rata – rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Pada sektor publik, fraud dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk fraud terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana. Fraud adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan pihak lain. Fraud memiliki dua kategori yaitu fraud yang bukan tindak kriminal masuk kategori risiko operasional, dan fraud yang tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. (ACFE, 2016).Tindakan fraud dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak (Kennedy dan Siregar, 2017). Kecurangan akuntansi (*fraud*) yang terjadi menjadi salah satu cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi yang illegal baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukakan oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh atau mendapatkan uang, asset, dan sebagainya yang tentunya dapat merugikan orang lain.

Fraud dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu korupsi, penyalahgunaan aktiva/kekayaan organisasi, dan kecurangan laporan keuangan. Dari ketiga jenis itu, jenis fraud yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi yang sebanyak 77% dari keseluruhan responden, jenis fraud yang paling merugikan di urutan kedua yaitu penyalahgunaan aktiva/kekayaan organisasi sebanyak 19% dari keseluruhan responden, sedangkan kecurangan laporan keuangan hanya berada pada urutan ketiga dengan jumlah 4% dari keseluruhan responden (ACFE, 2016).Fraud terjadi karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi,dimana seseorang mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah finansial.Kesempatan melakukan kecurangan biasanya dipicu karena adanya peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah dan ketidak disiplin.Kecuranganmenggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimasukkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, 2008).

Pertanyaan yang sering timbul, mengapa oknum-oknum tertentu melakukan fraud? mengapa pejabat tinggi dengan kedudukan dan penghasilan yang tinggi, seperti para politisi pembuat keputusan, dan bahkan lembaga peradilan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, demikian pula pimpinan LSM yang mempunyai misi memberantas korupsi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi?. Jawaban sederhana menjelaskan. Kebutuhan, serakah, dan peluang. adalah akar penyebab utama korupsi, seperti yang diungkapkan corruption (fraud) by need, by greed and by opportunity (Kotta T.M, 2010) .

Beberapa kemungkinan penyebab keterlibatan pejabat dalam tindakan fraud adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, misalnya memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup dan tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan, sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang tidak wajar sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil, tidak adanya bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini, proses penerimaan karyawan yang tidak fair serta kecerobohan atau tidak hati-hati, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.

Pentingnya mengkaji akar penyebab terjadinya fraud, pertama dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang pada akhirnya menghambat jalannya roda pemerintahan, sehingga tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu mensejahterahkan masyarakat tidak akan pernah tercapai. Misalnya tidak sedikit ditemukan dana-dana pembangunan yang ditujukan untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik terbengkalai karena dana-dana tersebut disalah gunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Akhirnya, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Hal ini juga mencoreng rasa keadilan masyarakat dan karena itu bagi siapa saja yang terbukti menyalahinya harus ditindak sebagai pembelajaran kepada yang bersangkutan dan pejabat lainnya (progressive approach). Hal yang kedua adalah bagaimana upaya agar siapapun pejabat sedini mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama (preventive approach).

Kasus kecendrungan kecurangan (fraud) yang pernah terjadi seperti yang dirilis (INDOPOS.CO.ID, 2019) yang dikatakan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa daerah-daerah yang Kepala Daerah dan anggota DPRD-nya menjadi tersangka di KPK, sistem perencanaan dan penganggaran APBD-nya punya skor buruk, misalnya dalam progres integrasi perencanaan dengan penganggaran di Pemprov Sumut hanya 18 persen, Pemprov Jambi 17 persen, dan Pemkot Malang 23 persen. "Artinya di daerah-daerah tersebut antara usulan proyek dari masyarakat dengan Rancangan APBD tidak 'nyambung' secara sistem, hal-hal inilah yang membuat DPRD menyelipkan proyek pribadi atau bahkan meminta uang ketok, karena lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana sehingga memuat rentan terjadi penyalahgunaan dana yang belum didesain dengan baik.

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi didasarkan pada fenomena yang terjadi terkait fraud. Salah satu jenis fraud menurut ACFE (2016) adalah korupsi yang menempati jenis fraud paling merugikan di urutan pertama. Kasus korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berinisial IK yang menjadi tersangka kasus korupsi dana program Pemberantasan Buta Aksara Alquran (PBAQ) senilai Rp3,2 miliar. Kasus ini menimbulkan kerugian negara karena ada pekerjaan fiktif dalam pengadaan alat peraga pada program Pemberantasan Buta Aksara Alquran (PBAQ). Kasus lainnya juga menyeret Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi periode berikutnya, berinisial AH, tertangkap dalam OTT KPK (Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam kasus suap ketok palu RAPBDP Provinsi Jambi. Nama Kadis Pendidikan Provinsi Jambi muncul dalam BAP mantan Gubernur Provinsi Jambi, ZZ, sebagai pemberi suap senilai Rp 1 Milyar. Lalu menurut ZZ dia bukanlah aktor utama dibalik adanya tindak pidana karena pihak eksekutif bukanlah pihak yang aktif berusaha melakukan penyuaipan, tetapi selalu berusaha menghindarkan diri dari permintaan penyuaipan dari lima pimpinan DPRD Provinsi Jambi untuk mendapatkan sejumlah uang dari kontraktor untuk memenuhi permintaan pimpinan anggota DPRD.

Fenomena lainnya menurut sumber berita (jambi.tribunnews.com, 2019) Kasus yang terjadi di Jambi, 2 ASN Dinas penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Terancam Dipecat, Setelah ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jambi. ASN tersebut adalah berinisial F dan I yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi pada program pemberian fasilitas layanan KSM di PT Bank Mandiri KCP Samratulangi, bersama tiga pegawai Bank Mandiri lainnya, yang mengakibatkan kerugian mencapai 3,4 miliar.

Pada kasus tersebut dapat dilihat bahwa anggota tersebut menganggap hal yang dilakukannya ini dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu dia menganggap hal itu wajar atau sah-sah saja maka dia ikut melakukan fraud. Padahal, bila sudah terintegrasi, pasti percaya diri karena transparan dan banyak yang memantau.

Fenomena lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sesuai dengan temuan audit BPK. Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi Jambi, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Jambi tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi ke BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD provinsi di tahun 2017. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan signifikan yang perlu perbaikan dan perlu ditindaklanjuti segera, yaitu: Pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri, penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pengalihan kewenangan belum memadai, pengadaan alat peraga atau praktek SMK melalui penunjukan langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak sesuai ketentuan sebesar RP3,20 Miliar. (beritajambi.co, 2018)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi tahun 2013 lalu juga ditemukan sebanyak 37 aset tetap gedung dan bangunan di Dinas Pendidikan tidak diketahui keberadaannya. Aset tersebut mencapai Rp 2,1 miliar. Pansus mengaku heran mengapa aset berupa gedung tersebut bisa tidak terlacak, pasalnya jumlahnya juga tidak sedikit dan nilainya pun juga mencapai miliaran rupiah. Pansus I juga menyoroti hasil LHP BPK, meski Provinsi Jambi tahun 2013 kemarin mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan namun menurut dewan rekomendasi dari BPK meningkat dibandingkan tahun 2012. Dari LHP terhadap sistem pengendalian intern atas LKPD Provinsi Jambi terdapat 9 temuan kelemahan dengan 14 rekomendasi (Bandot, 2014).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi, modus operandi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Jenis kecurangan dan modus operandi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung pada sistem penegakan peraturan di negara tersebut. Di negara maju yang memiliki kondisi ekonomi yang bagus dan sistem penegakan peraturan yang berjalan dengan baik praktik kecurangan lebih sedikit modus operandinya, sedangkan di negara berkembang akan lebih banyak modus operandi tindak kecurangannya. Para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan

dari lemahnya sistem pengendalian dan penegakan peraturan Sektor dunia usaha (bisnis) dan sektor publik (instansi pemerintah) tidak lepas dari berbagai macam tindak kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak di dalam organisasi maupun di luar organisasi. di sektor publik tindak kecurangan lebih menonjol dibanding sektor usaha dikarenakan sistem pengelolaan keuangan di pemerintahan bersifat sentralisasi. namun sejak reformasi Pemerintah dituntut akan transparansi dan akuntabilitasnya. oleh karena itu, Pemerintah berupaya membuat berbagai macam regulasi untuk memperkuat struktur kelembagaan keuangan dan pencegahan dan penanganan tindak kecurangan di pemerintahan.

Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sulit terdeteksi karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan suatu proyek. Oleh karena itu, auditor laporan keuangan harus mempunyai keahlian untuk mendeteksi kecurangan ini. untuk tindak lebih lanjut, auditor laporan keuangan ini hanya dapat mendeteksi saja sedangkan untuk pengungkapannya diserahkan pada auditor forensik yang lebih berwenang. Auditor forensik inilah yang nantinya akan menggunakan suatu aplikasi audit lain selain audit biasa yang digunakan para auditor laporan keuangan untuk mengungkapkan kecurangan yaitu Audit forensik.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Umum Kecurangan (*Fraud*)

Seseorang yang melakukan tindakan fraud didasarkan pada motivasi yang berbeda-beda. Menurut (Kotta T.M, 2010), tindakan fraud karena beberapa motivasi yang dikenal dengan istilah fraud triangle atau segitiga fraud, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Kecurangan yang merupakan masalah global dan terjadi secara terus menerus menimbulkan banyak pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi walaupun telah begitu banyak tindakan pencegahan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wilopo, 2006) menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya kecurangan, khususnya kecurangan akuntansi disebabkan antara lain oleh (1) keefektifan pengendalian internal, (2) memadainya kompensasi, (3) ketaatan pada aturan akuntansi, (4) keberadaan asimetri informasi, (5) moralitas manajemen, dan (6) perilaku tidak etis dari pengelola organisasi.

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh (Wolfe, David, & Hermanson, 2004) *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni *capability*.

Para ahli kriminolog lain sering menyatakan bahwa terjadinya kejahatan (dalam hal ini kecurangan) lebih disebabkan karena adanya peluang dan kebutuhan (Brooks, 2007), menjelaskan kejahatan kerah putih melalui kajian *GONE Theory*. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan kerah putih disebabkan dan didorong oleh faktor: 1. *Greedy* (keserakahan), 2. *Opportunity* (kesempatan), 3. *Need* (kebutuhan), 4. *Expectation* (anggapan).

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam (Najahningrum, 2013) kecurangan merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

2.2. Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut :

- a. *Financial Statement Fraud* (Kecurangan Laporan Keuangan) Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

- b. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset) Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan Kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
- c. *Corruption* (Korupsi) Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut *ACFE*, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut *ACFE*, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

2.3. *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Fraud yang sering terjadi disektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemilik untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi (Adinda, 2015). Sementara itu menurut De Asis (2000) adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana illegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara illegal dan teknik lobi menyimpang). Tipe korupsi yang terakhir yaitu clientelism “Pola Hubungan Langgan” (Zulkarnain & Rifqi Mirza, 2013).

(Kotta T.M, 2010) mendefinisikan “korupsi adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi”. Menurut *Transparency International* (Sahetapy, 2013) korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

(Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.) & (Republik Indonesia. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3), termasuk juga penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi.

Menurut (Sahetapy, 2013) korupsi sudah mewabah di Indonesia, merajalela di hampir seluruh instansi publik, seluruh tingkatan di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Hampir tanpa rasa malu lagi apabila yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi. Bahkan pihak swasta/non pemerintah turut andil dan bekerja sama dengan pegawai pemerintah dalam tindak korupsi. Skandal korupsi di Indonesia bahkan sudah dianggap hal yang biasa. Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Tindak korupsi yang sering dilakukan antara lain penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan/perusakan bukti dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara. Tindakan *fraud* ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan.

Skema *fraud* yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP dalam (Najahningrum, 2013) menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi penerimaan:
 - 1) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia.
 - 2) Manipulasi restitusi pajak.
 - 3) Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya.
 - 4) Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea.
 - 5) Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai data sesungguhnya.
 - 6) Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat /daerah memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam.
 - 7) Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara.

- 8) Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar.
- 9) Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun cara ini berpotensi merugikan negara.

b. Dari segi pengeluaran:

- 1) Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas barang fiktif.
- 2) Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan
- 3) Penggelembungan (mark-up) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar.
- 4) Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau sesuai prosedur tetapi hanya memenuhi persyaratan formalitas.
- 5) Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi.
- 6) Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah sasaran.
- 7) Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan, akuntan, underwriter, dan penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program pemerintah/ BUMN.

2.4. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah bidang ilmu akuntansi yang saat ini paling banyak digunakan dalam setiap instansi-instansi pemerintahan. Adanya kewajiban transparansi dan akuntabilitas atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah adalah hal mendasar dalam menilai pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintah menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintah dan menyajikan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara berdasarkan transparansi dan akuntabilitas dari informasi laporan akuntansi itu sendiri (Nordawan, 2010).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *survey* melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan uji statistik melalui aplikasi spss. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penentuan dan pemecahan masalah penelitian (Indriantoro & Supomo, 2018).

3.2. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasannya:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, website resmi, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (primer). Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode survey yaitu dengan cara mengirimkan kuesioner pada instansi. penelitian ini menggunakan data primer meliputi data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kuantitatif. penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini dengan menyebar kuesioner kepada reponden. Penentuan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling sehingga didapat sample sebanyak 52 dari 21 Dinas-Dinas Prrovinsi Jambi. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan menggunakan program SPSS for windows versi 22.

3.5. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- a. Uji Validitas dan Uji reliabilitas. Uji kualitas Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas (Indriantoro & Supomo, 2018).
- b. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2016).
- c. Uji Asumsi Klasik Terdapat beberapa syarat sebelum melakukan regresi yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Jika asumsi tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Model regresi harus memenuhi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik yaitu bebas heteroskedastisitas dan multikolineritas Dengan melakukan A. Uji Normalitas, B. Uji Multikolinearitas, dan C. Uji Heteroskedastisitas.
- d. Analisis Regresi Linier berganda Menurut Sugiyono (2014) bahwa Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).
- e. Uji Hipotesis yaitu A. Uji F Untuk menjawab rumusan masalah pertama digunakan uji F sebagai pengujian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan) dengan uji F menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (Ghozali, 2014). B. Uji Untuk menjawab rumusan masalah kedua, ketiga dan keempat maka akan digunakan uji statistik t. Pengujian parameter individu (Uji t) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2016), C. Koefisien Determinasi (R^2) Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2014). Nilai R^2 berada antar 0 dan 1 semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka akan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, untuk mengetahui besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) dipilihnya *Adjusted R Square* agar tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam model, karena tidak seperti R^2 nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model, sedangkan R^2 setiap tambahan satu variabel independen, maka *R Square* pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Pengaruh Kompetensi SDM, Pengendalian Internal, dan Penegakan Peraturan Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*)

Kompetensi SDM, Pengendalian Internal, dan Penegakan peraturan / hukum secara simultan berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil Kecendrungan Kecurangan memiliki nilai minimal 1 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata Kecendrungan kecurangan Penipuan (Y) dari 9 pertanyaan adalah 1,93 atau 38,6% dengan demikian Variabel Kecendrungan Kecurangan Fraud (Y) berada pada kategori Tidak baik / rendah, dan dengan standar deviasi sebesar 0,890. Hal ini terlihat yang berkontribusi terhadap hal tersebut adalah terjaga dan pengaruh (X1) yang positif dan sangat dominan, bisa memperhatikan nilai koefisien standar beta untuk variabel (X1). Namun demikian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengendalian (X2) dan peraturan (X3) berada di kategori sangat baik / tinggi. Tetapi Faktor lain tidak berpengaruhnya Pengendalian Internal dan berpengaruh negatif signifikan peraturan peraturan terhadap kecendrungan kecurangan kemungkinan ada pernyataan-pernyataan sensitif yang dapat menimbulkan ketidaksignifikan hasil ini dibuktikan dari beberapa dinas yang masih ada yang menjawab netral dan Tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pada dinas provinsi intervensi masih cukup tinggi yang dapat mempengaruhi kecurangan sehingga pengendalian internal atau penegakan peraturan menjadi masalah yang tetap harus diperhatikan.

4.2. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*)

Kompetensi Sdm secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kecendrungan Kecurangan Fraud Hal ini menunjukkan Semakin ahli atau kompeten seseorang maka dapat menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Seseorang dapat dikatakan berkompoten apabila dalam melakukan pekerjaannya dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah melakukan kesalahan. Kompetensi itu akan menentukan derajat level keyakinan seseorang akan hasil kualitas pekerjaannya. Yang membuat berkualitasnya hasil akan pekerjaannya walaupun pekerjaan itu sulit dan rumit akan tetapi karena yang mengerjakan pekerjaannya orang auditor yang berkompoten maka akan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Artinya semakin kompeten seseorang, secara teoritis pun akan lebih berkualitas hasil kerjanya. Hal ini dibuktikan dengan baiknya dan tingginya pengaruh (X₁) yang positif dan sangat dominan, bisa diperhatikan nilai standardized coefficient beta untuk variabel (X₁). Hal ini menunjukkan semakin kompeten pejabat keuangan semakin tinggi kecenderungannya untuk melakukan (Fraud).

4.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*)

Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Fraud. Seperti hal yang sebelumnya kemungkinan ada pernyataan-pernyataan sensitif yang dapat menimbulkan ketidaksignifikan hasil ini dibuktikan dari beberapa dinas yang masih ada yang menjawab netral dan Tidak setuju walaupun berada di kategori sangat baik/tinggi . Ataupun pengendalian internal pada lingkup Pemerintah Dinas-Dinas Provinsi Jambi sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik, Namun kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi menurut peneliti disebabkan oleh perilaku tidak etis yang dimiliki oleh individu yang bertugas dan bertanggungjawab pada proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena meskipun sistem pengendalian internal diterapkan ataupun tidak diterapkan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi karena ternyata ada pengaruh faktor lain yaitu perilaku tidak etis yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Kusumastuti (2012) Perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan individu tergantung pada moralitas individu yang bersangkutan. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh individunya mencerminkan moralitas organisasi itu sendiri. sehingga dalam konstek keefektifan pengendalian internal ini tidak bisa mendeteksi kemungkinan pegawai melakukan tindak kecurangan namun kenyataannya melakukan fraud ini pegawai instansi mematuhi prosedur dan sistem sesuai dengan alur tugas dan tanggung jawab. Tetapi pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal pada salah satu dinas ada yang tidak dilakukan atau juga tidak dilakukan secara terus menerus sehingga akan membuka peluang bagi pegawai instansi untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud). Dalam penelitian ini Pengendalian Internal Belum Terbukti dapat menurunkan kecendrungan kecurangan (Fraud).

4.4. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Penegakan Peraturan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan fraud. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata bobot jawaban dari variabel Penegakan Peraturan (X_3) memiliki nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata Pengalaman Kerja (X_3) dari 5 pertanyaan adalah 4,19 atau 83,8% dengan demikian Variabel Penegakan Peraturan (X_3) berada pada kategori sangat baik. Tetapi jawaban dari masing masing dinas ada yang punya perbedaan yaitu dimana masih ada yang memberikan pernyataan Tidak Setuju Dan Menjawab Netral. Sementara dinas lain cenderung sangat setuju dan setuju. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya indikasi pernyataan tidak setuju dan netral terutama pada item PP2,PP3,PP4,PP5. pada beberapa dinas terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hal ini membuktikan bahwa semakin efektifnya penegakan hukum di suatu instansi pemerintahan dinas-dinas di provinsi jambi dapat menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan ini dibuktikan dan dapat dijelaskan oleh besarnya tingkat nilai signifikansi sebesar 0,000. tetapi juga masih ada beberapa dinas yang belum menjalankan peraturan hal ini dibuktikan dengan jawaban kuesioner dari jawaban instrument PP2,PP3,PP4,PP5. Hal ini berarti semakin ditegakkan peraturan ,semakin rendah kecurangan (*Fraud*).

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Penegakan peraturan / undang-undang secara simultan terhadap kecenderungan terjadinya fraud.
- b. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kecenderungan curang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompeten pejabat keuangan maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan fraud.
- c. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kecenderungan Penipuan. Dalam penelitian ini Pengendalian Internal belum terbukti dapat mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*).
- d. Penegakan regulasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin ditegakkan aturan maka semakin rendah kecurangan (*fraud*).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

- a. Bagi aparatur Perangkat Dinas – Dinas Provinsi Jambi, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pemerintah sebagai tanggung jawab selaku pelayan publik yang mengelola anggaran agar dapat menyejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi melalui akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian intern yang baik dan pelaporan yang tertata dan terstruktur.
- b. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung, peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan juga metode pengumpulan data wawancara sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan lengkap. Disarankan juga untuk memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah aparatur yang bekerja pada Kantor Instansi Pemerintah yang berada di Provinsi Jambi, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi dan hendaknya menggunakan variabel yang lebih baru dan belum pernah atau jarang digunakan oleh peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA, SAS No. 99. (2002). *Consideration Of Fraud In A Financial Statement Audit*, Aicpa. NewYork, PP.
- Beritajambi.co. (2018, 06 26). Retrieved januari 10, 2020, from beritajambi.co: <https://beritajambi.co/read/2018/06/26/4281/meski-raih-wtp-bpk-masih-soroti-dinas-pendidikan-provinsi-ada-apa>
- INDOPOS.CO.ID. (2019, JANUARI 2). Retrieved JANUARI 10, 2020, from INDOPOS.CO.ID: <https://indopos.co.id/read/2019/01/02/160402/cegah-tren-korupsi-meningkat/>
- Adinda, Y. M. (2015). "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten". *Accountin Analysis Journal*, Vol.18, No. 1.
- Agusyani, & Siska, N. K. (2016). "Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)". *E-Jurnal Akuntansi . Program SI Universitas Pendidikan Ganेशha*, Vol.6, No.3.
- Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. (2015). "Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur". Vol. 11, No.1.
- Arikunto, & Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, & Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2008). Menuju negara hukum yang demokratis. *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan*.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) . 2016 .*Report to Nation*. Diambil dari <http://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016.pdf>.
- Atmaja, & Tungga, A. (2017). "Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis Vol. 12 No. 1*, 7-16.
- Azhar. (2007). "Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun". *Tesis USU*.
- Bandot, A. (2014, 07 17). *jambi.tribunnews.com*. Retrieved januari 10, 2020, from [jambi.tribunnews.com: https://jambi.tribunnews.com/2014/07/17/37-aset-bangunan-diknas-provinsi-jambi-tidak-diketahui-keberadaannya](https://jambi.tribunnews.com/2014/07/17/37-aset-bangunan-diknas-provinsi-jambi-tidak-diketahui-keberadaannya)
- Basirruddin, M. (2012). "Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti". *Jom FISIP*, Vol. 1 (2).
- Brooks. (2007). "Kecurangan Adanya Peluang Dan Kebutuhan (*GONE Theory*)".
- COSO. (2004). "Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Committee Of Sponsoringorganizations".
- Cressey. (1953). "Tiga Komponen Rationalization, Pressure, Dan Opportunity". *The Fraud Triangle Theory*.
- Didi, & Cahya Kusuma, I. (2018). "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.*, Vol.15, No.1.
- Dina, H. (2011). "Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". *Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Brawijaya*.
- Faisal, M. (2013). "Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No.1.
- Ghozali, I. (2014). "Aplikasi Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Program SPSS. Semarang : Universitas Diponegoro".

- Ghozali, I. (2016). In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrik, M. (2016). "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No.1.
- Huda, M. (2011). "Peran Peraturan Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MAN Malang II Batu". *Skripsi. Malang : UIN Malang*.
- Huda, Mohammad Choirul. (2011). "Peran Peraturan Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MAN Malang II Batu". *Skripsi. Malang : UIN Malang*.
- Husein, Umar. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). In *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (p. Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- jambi.tribunnews.com. (2019, April 12). *Tribunjambi.com*. Retrieved Januari 10, 2020, from Tribunjambi.com: <https://jambi.tribunnews.com/2019/04/12/jadi-tersangka-korupsi-dua-asn-di-jambi-terancam-dipecat-ini-kasus-yang-menjeratnya>
- Kotta T.M, T. (2010). In *Akuntansi Forensik dan audit investigatif* (p. Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumastuti, N. (2012). 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening". *Skripsi S1 program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- METROJAMBI.COM. (2019, Maret 24). *METROJAMBI*. Retrieved Januari 10, 2020, from METROJAMBI: <https://metrojambi.com/read/2019/03/25/42013/anggaran-perjalanan-dinas-opd-pemprov-jambi-capai-ratusan-miliar>
- Mulyadi. (2008). *Auditing*. Edisi Keenam. Salemba Empat : Jakarta.
- Mustikasari, D. (2013). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang". *Accounting Analysis Journal*, Vol.2,No. 3.
- Najahningrum. (2013). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY". *Symposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Nordiawan, Deddi, & Ayuningtias, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurul, A., Made, & Putu, G. (2017). "Pengaruh Persepektif Fraud Diamond Terhadap Kecendrungan Terjadinya Kecurangan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Lombok Timur". *Kecendrungan Terjadinya Kecurangan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan*, Vol. 8, No. 2.
- Pramudita, A. (2013). "Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga". *Accounting Analysis Journal*, Vol 2. No 1.
- Pristiyanti, I. R. (2012). "Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan". *Accounting Analysis Journal*, Vol.1, No. 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah".
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Robbins, & Stephen P. (2003). "Organization Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh)". In & S. Robbins, *Organization Behaviour, Tenth Edition* (p. Edisi 10). Jakarta: Pt Macana Jaya Cemerlang.
- Sahetapy. (2013). "Transparency International".

Sekaran, U. (2014). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*.

Singleton. (2006). "Fraud, Theft, Defalcation, Irregularities, White Collar Crime, Dan Embezzlement".

Sitorus, & Scott. (2008). "Faktor Collusion (Kolusi), Justice Avoidance (Penghindaran Hukum), Dan Organisational Orientation (Orientasi Organisasi)".

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta : Jakarta. In Sugiyono.

Syahrani, U. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur). *Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi Program S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX Padang*.

Wilopo. (2008). "Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah Dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan" *Jurnal Ventura Volume 11*, Volume 11 No. 1.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud (Empat Komponen Yaitu Rationalization, Pressure, Opportunity, Dan Capability). *CPA Journal 74*,(12):, 38-42.

Zulkarnain, & Rifqi Mirza. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). *Skripsi Fakultas Ekonomi Program S1 Universitas Negeri Semarang*.